



Analisis Penerapan Prosedur Audit Dana Kampanye Partai Politik Pada KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan

Gabrena Septi Aulia

21013010319@student.upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Rida Perwita Sari

ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar Surabaya Jawa Timur 60294 Indonesia

21013010319@student.upnjatim.ac.id

Abstrak. *This study provides an understanding of how the implementation of campaign finance audit procedures and evaluates its compliance with applicable regulations. The results showed that during the process of auditing campaign funds, KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan had implemented campaign fund audit procedures in accordance with the audit procedures and had submitted campaign fund audit reports in a timely manner to the KPU. This research also provides evaluation results to improve audit procedures, including increased auditor training and the development of more detailed audit guidelines. So that in general, the implementation of campaign finance audit procedures at KAP Bambang Sutjipto, Ngumar & Rekan has met the established audit quality standards.*

Keywords: *Audit Procedures; campaign finance; Political Parties*

Abstrak. Penelitian ini memberikan pemahaman mengenai bagaimana penerapan prosedur audit dana kampanye dan mengevaluasi kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku. Hasil peneliti didapatkan bahwa selama proses mengaudit dana kampanye, KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan telah menerapkan prosedur audit dana kampanye sesuai pada prosedur pemeriksaan serta telah menyerahkan laporan audit dana kampanye secara tepat waktu kepada KPU. Penelitian juga ini memberikan hasil evaluasi untuk meningkatkan prosedur audit, termasuk peningkatan pelatihan auditor dan pengembangan pedoman audit yang lebih rinci. Sehingga secara garis besar, penerapan prosedur pemeriksaan dana kampanye pada KAP Bambang Sutjipto, Ngumar & Rekan telah memenuhi standar mutu audit yang telah ditetapkan.

Kata Kunci: *Prosedur Audit; Dana Kampanye; Partai Politik*

PENDAHULUAN

Partai politik merupakan lembaga yang dibentuk guna mencapai tujuan politik hal ini untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah atau memenangkan pemilu¹. Pemilihan umum partai memiliki pengaruh penting untuk kelangsungan sistem demokrasi karena menyediakan tempat untuk masyarakat berpartisipasi dalam proses politik.

Agar suatu partai politik dapat menang dalam pemilihan umum diperlukan anggaran kampanye yang besar agar menarik perhatian masyarakat untuk memilih calon pasangan dan memperoleh suara yang banyak. Dana kampanye merupakan sumber

¹ Ogiandhafiz Juanda and Juanda, “Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024,” *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 140–47, <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

keuangan yang digunakan oleh partai politik untuk mendukung kegiatan kampanye, seperti kegiatan kampanye di lapangan, acara politik, dan berbagai upaya untuk mempengaruhi opini public dalam memenangkan pemilu.

Audit dana kampanye tidak sama pada audit pada umumnya. Audit dana kampanye adalah pemeriksaan yang bertujuan untuk mengeluarkan pernyataan atas peraturan yang telah dibentuk oleh partai melalui laporan keuangan kampanye yang meliputi Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dan kepatuhan pemilu terhadap peraturan terkait pedanaan kampanye². Audit keuangan kampanye adalah audit yang harus mencantumkan beberapa pihak seperti, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Kantor Akuntan Publik (KAP), dan Partai Politik Peserta Pemilu³. Auditor diharapkan untuk menerapkan pertimbangan profesional dalam mempersiapkan dan melaksanakan proses audit yang tepat guna menghasilkan kesimpulan yang akan dicapai. Melalui analisis penelitian ini penulis diharapkan dapat memberikan gambaran tentang praktik audit dana kampanye serta memberikan informasi untuk perbaikan prosedur audit dana kampanye yang akan datang. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan tetapi juga bagi partai politik dalam upaya mereka untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dan kampanye.

Berdasarkan uraian di atas penulis memilih judul "**Analisi Penerapan Prosedur Audit Dana Kampanye Oleh KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan**". Tujuannya untuk mengetahui tata cara audit dana kampanye serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan standar yang berlaku

LANDASAN TEORI

Prosedur

Prosedur merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan beberapa orang atau lebih dan dilakukan berkali-kali dengan cara yang sama⁴. Menurut gagasan para ahli

² R Ramadhan, S Shoalihin, and M I Mansyuri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 26930–43, <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10970%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/10970/8713>.

³ Ogiandhafiz Juanda, "ANALISIS PERILAKU REDUKSI KUALITAS AUDIT KAP X DALAM MELAKSANAKAN AUDIT BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI (STUDI KASUS PADA AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 PARTAI X)," *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, 2023, 76–76, https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100043.

⁴ Roy Irawan Darma Wijaya, "Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat," *Skripsi Pengertian Penjualan XVI*, no. 1 (2018): 30.

dapat dikatakan bahwa definisi prosedur merupakan serangkaian aktivitas operasi untuk memproses aktivitas secara berulang untuk memperoleh hasil yang ingin dicapai ⁵. Sehingga prosedur dapat diterapkan pada berbagai situasi dengan tujuan untuk memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana melakukan suatu pekerjaan atau mencapai suatu hasil secara efektif dan efisien.

Prosedur dalam konteks audit memainkan peran yang sangat penting karena menyediakan kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis untuk memastikan bahwa proses audit dilaksanakan secara menyeluruh, terstruktur, dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Langkah pertama, prosedur audit dimulai dengan penyusunan rencana audit, yang mencakup identifikasi area-area yang akan diaudit, penetapan tujuan audit, dan alokasi sumber daya. Tahap ini memastikan bahwa auditor memiliki panduan yang jelas tentang apa yang harus dicapai selama audit dan bagaimana caranya.

Secara keseluruhan, prosedur adalah elemen kunci dalam audit yang memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan cara yang sistematis, konsisten, dan dapat diandalkan, menghasilkan temuan dan rekomendasi yang akurat dan bermanfaat bagi organisasi.

Partai Politik

Partai politik merupakan elemen krusial yang mempunyai bagian paling penting dalam demokrasi dan memegang tanggung jawab utama dalam menjalankan mekanisme demokrasi di suatu negara. Jika terjadi kekacauan dan ketidakstabilan dalam pemerintahan suatu negara, partai politik merupakan lembaga yang sangat bertanggung jawab mengenai kondisi tersebut ⁶. Sebuah negara tidak akan bisa mencapai kondisi yang kondusif jika tidak berjalan seiring dengan politik. Sebab, politik mempunyai peran sebagai stabilisator untuk mendukung pembangunan perekonomian di suatu daerah ⁷.

Berbicara mengenai demokrasi, dikatakan bahwa partai politik merupakan pilar dalam menjaga demokrasi. Bahwasannya diartikan kualitas hidup bangsa dan negara sangat bergantung pada kualitas partai politik dalam menjalankan amanah masyarakat.

⁵ Retha Dwi Putri Veraniyansyah and Erlangga Andi Sukma, "Prosedur Pengelolaan Arsip Untuk Keamanan Dokumen Di Rsia Puri Bunda Malang," *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2019): 65, <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v13i1.66>.

⁶ Juanda, "ANALISIS PERILAKU REDUKSI KUALITAS AUDIT KAP X DALAM MELAKSANAKAN AUDIT BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI (STUDI KASUS PADA AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 PARTAI X)."

⁷ Luh Putu Suryani I Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat," *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 01 (2020): 62–68, <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>.

Guna mewujudkan harapan masyarakat, partai politik harus memperbaiki menjadi diri yang lebih baik lagi serta berpartisipasi untuk menjadi pilar untuk memajukan kesejahteraan serta kesuksesan bagi rakyat, bangsa, dan negara .⁸.

Partai politik memiliki fungsi penting dalam sistem demokrasi yaitu mewakili berbagai kepentingan dan aspirasi masyarakat, menawarkan alternatif politik dalam pemilihan umum, membuka peluang partisipasi politik individu, memfasilitasi pembentukan pemerintahan, mengawasi kebijakan pemerintah, menyediakan edukasi politik. Melalui peran-peran ini, partai politik menjadi bagian integral dari proses politik dalam sebuah negara demokratis.

Audit

Audit merupakan proses pengumpulan bukti yang sistematis dan independen untuk mengevaluasi informasi dalam suatu organisasi dengan tujuan untuk menilai kelengkapan informasi dan menilai secara objektif situasi yang sedang dievaluasi. Audit merupakan kegiatan memeriksa informasi spesifik yang terkandung dalam laporan guna untuk memastikan keakuratan. Selama pemeriksaan, informasi yang tercantum dalam laporan diperiksa secara rinci untuk memastikan tidak ada data yang menyimpang.

Audit dilakukan agar informasi dalam laporan sesuai dengan fakta data yang ada⁹. Berdasarkan pengertian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa audit merupakan proses pemeriksaan laporan yang sistematis dan objektif. Hal ini untuk menjamin kesesuaian pernyataan dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu audit juga memiliki tujuan yaitu memberikan keyakinan mengenai keandalan laporan keuangan, memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan standar, menilai dan meningkatkan sistem pengendalian internal, memberikan rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan manajemen risiko, serta memperkuat tata kelola perusahaan. Sehingga audit memiliki peran penting dalam mendukung transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi operasional entitas yang diaudit.

Secara keseluruhan, laporan keuangan yang berkualitas dan valid sangat penting untuk pengambilan keputusan yang tepat. Mereka menyediakan dasar yang kuat bagi pemangku kepentingan untuk menilai kinerja dan posisi keuangan perusahaan,

⁸ M Prakoso Aji and Jerry Indrawan, "Hambatan Dan Tantangan Partai Politik : Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024," *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8, no. 2 (2020): 214–29, <http://ejournal.kopertais4.or.id>.

⁹ Rima Mawarni, Elisa Ayu Putri, and Dewi Triyanti, "AUDIT SISTEM INFORMASI E-LEARNING MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0 (STUDY KASUS: E-LEARNING SLBN Sukamaju Kotabumi-Lampung Utara)," *Jisn* 03, no. 01 (2022): 18–25.

merencanakan masa depan, dan membuat keputusan yang berinformasi. Proses audit oleh auditor independen adalah langkah krusial dalam memastikan bahwa laporan keuangan memenuhi standar kualitas yang tinggi, sehingga pengguna dapat memiliki kepercayaan penuh terhadap informasi yang disajikan.

Dana Kampanye

Dana kampanye merupakan dana yang digunakan oleh calon pasangan partai politik untuk mendanai kegiatan sewaktu berkampanye sampai dengan batas yang ditentukan¹⁰. Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kampanye politik. Pendanaan kampanye berasal dari berbagai sumber, termasuk sumbangan dari individu maupun organisasi. Dengan demikian dapat diartikan bahwa dana kampanye mempunyai makna yang lebih luas, bukan hanya sekedar uang, melainkan juga hal material lainnya seperti barang dan jasa¹¹. Aturan mengenai pendanaan kampanye partai politik harus mempunyai sumber pendanaan yang jelas. Hal ini mencakup asal dana, jumlah nominal pendanaan, serta batas maksimal penerimaan sumbangan untuk kampanye.

Besaran dana ini harus dilakukan pengawasan untuk memastikan anggaran dan proses politik terkendali dengan benar sesuai dengan kegunaan. Salah satu alat untuk mengontrol pengendalian anggaran dengan melakukan prosedur audit dengan benar. Secara keseluruhan, fungsi dana kampanye sangat krusial dalam memastikan bahwa kegiatan kampanye dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Dana kampanye memungkinkan partai politik dan kandidat untuk berkomunikasi dengan pemilih, menjalankan strategi kampanye, dan berpartisipasi dalam pemilihan umum secara adil dan transparan

Dalam konteks modern, media sosial dan teknologi digital telah menjadi alat penting dalam kampanye politik, sehingga sebagian dana kampanye kini juga diarahkan untuk strategi digital. Ini termasuk pemasaran di media sosial, iklan online, serta pengembangan dan pemeliharaan situs web kampanye. Penggunaan dana kampanye dalam ruang digital juga harus dikelola dengan baik, mengingat potensi reach dan dampaknya yang sangat luas.

¹⁰ Ramadhan, Shoalihin, and Mansyuri, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik."

¹¹ Daffa Athaillah Maulana and Andafi Feyla Qintara, "Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye Pada Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia," *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 1 (2023): 73–88, <https://mhn.bphn.go.id>.

Secara keseluruhan, dana kampanye adalah elemen penting dalam proses pemilihan umum yang memerlukan pengelolaan yang transparan, efisien, dan sesuai dengan peraturan. Penggunaan dana yang tepat dan pelaporan yang transparan tidak hanya membantu dalam menjalankan kampanye yang efektif tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kandidat atau partai politik yang bersangkutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data serta informasi yang berkaitan dengan objek, kejadian, atau peristiwa tertentu. Metode deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memberikan gambaran rinci dan mendalam mengenai topik yang diteliti. Dalam konteks penelitian ini, fokusnya adalah pada penerapan prosedur audit dana kampanye. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menemukan gambaran nyata tentang bagaimana prosedur audit dana kampanye diterapkan, serta menilai sejauh mana penerapan tersebut telah sesuai dengan kebijakan dan regulasi yang berlaku. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai efektivitas dan kepatuhan prosedur audit dana kampanye terhadap aturan yang telah ditetapkan, serta mengidentifikasi potensi area untuk perbaikan atau penyesuaian. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini akan dibagi menjadi beberapa bagian yang diharapkan relevan dengan topik yang diteliti, khususnya mengenai dana kampanye partai politik. Setiap bagian akan mencakup berbagai aspek penting yang terkait dengan dana kampanye, termasuk sumber pendanaan, pengawasan, dan audit yang diperlukan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat menemukan tahapan yang membutuhkan perbaikan atau penyesuaian dalam prosedur audit, serta memberikan rekomendasi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana kampanye. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan yang lebih efektif dan efisien dalam mengatur dana kampanye partai politik.

Perencanaan Audit

Saat melakukan perencanaan audit terkait program audit, Ketua tim audit KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan menjelaskan mengenai bahwa perencanaan audit

dana kampanye dilakukan dalam bentuk kontrak dan ditandatangani sesuai kesepakatan dengan tim KPU. Selain merencanakan prosedur audit, tim auditor perlu memahami dana kampanye secara menyeluruh serta menganalisis risiko yang terdapat di dalam laporan dana kampanye. Hal ini penting bagi auditor untuk mengidentifikasi potensi masalah dalam laporan dana kampanye. Perencanaan audit dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu: memahami karakteristik partai politik, auditor harus memahami struktur organisasi partai politik, sumber pendanaan, serta kebijakan dan prosedur internal yang mengatur penggunaan dana kampanye; penilaian risiko, yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan material dalam laporan keuangan dana kampanye; menyusun audit program audit program adalah rencana operasional yang merinci langkah-langkah konkret yang akan dilakukan oleh auditor dalam menjalankan audit. Program ini disusun berdasarkan rencana audit yang lebih luas dan mencakup detail-detail seperti daftar pemeriksaan, prosedur audit, serta waktu dan sumber daya yang dialokasikan untuk setiap langkah. Audit program membantu memastikan bahwa audit dapat digunakan secara sistematis dan komprehensif, sesuai dengan standar audit yang ditetapkan¹².

Perencanaan audit juga bertujuan untuk menentukan ruang lingkup audit, mengidentifikasi risiko, mengembangkan strategi dengan efektif dan memastikan kepatuhan terhadap standar professional. Perencanaan audit juga memastikan bahwa audit dilakukan sesuai dengan standar profesional dan peraturan yang berlaku, serta membantu jadwal audit agar dapat diselesaikan tepat waktu.

Pelaksanaan Audit Dana Kampanye

Sebelum melaksanakan audit, KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan harus terlebih dahulu mendaftar pada situs online yang akan digunakan yaitu Sikadeka (Sistem Informasi Kampanye Dana Kampanye). Setelah terdaftar maka auditor akan memperoleh portal dari KPU untuk mengunduh laporan dana kampanye yang sesuai dengan pasangan calon partai politik. Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan akan mendapat laporan secara rinci mengenai sumbangan kampanye di mulai dengan laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dan kampanye, hingga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye.

¹² Hafifah Nasution and Lysa Nur Awalianti, "Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik KURNIAWAN, KUSMADI, DAN MATHEUS," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, no. 3 (2020): 237–44, <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.333>.

Apabila auditor telah mengumpulkan bukti maka selanjutnya adalah auditor melakukan evaluasi guna untuk menguatkan bahwa bukti yang telah dikumpulkan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan untuk analisis dan evaluasi laporan keuangan kampanye. Kemudian, tim audit melakukan verifikasi terhadap kepatuhan Laporan Penerimaan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari pasangan calon utama di daerah tersebut..

Salah satu langkah dalam melaksanakan audit dana kampanye adalah melalui prosedur verifikasi. Auditor dana kampanye dari Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan menjalankan tahap verifikasi kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengkonfirmasi mengenai kepatuhan dalam penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK), Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK), dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dari pasangan calon kepala daerah. Auditor perlu melakukan konfirmasi dengan pihak bank untuk memverifikasi pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye. Memverifikasi dapat dilaksanakan bagi pihak yang memberikan pendanaan guna menegaskan keabsahan serta keakuratan informasi mengenai pemberian dana kampanye.

Pelaporan Audit Dana Kampanye

Pelaporan audit kampanye adalah sebuah penyampaian laporan keuangan dengan menjelaskan penggunaan uang yang diterima atau dikeluarkan untuk kampanye politik. Audit ini mencakup penerimaan dan pengeluaran dana serta memastikan seluruh transaksi tercatat dengan akurat. Hasil peninjauan ini kemudian dilaporkan kepada pihak yang berwenang, seperti pengawas pemilu atau lembaga pemerintah yang bertugas mengatur kampanye politik dengan tujuan untuk mendorong transparansi, akuntabilitas dan kepatuhan. Pelaporan dana kampanye memiliki beberapa tujuan diantaranya: memastikan partai atau kandidat politik mematuhi peraturan dan undang-undang yang berlaku; memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat mengenai sumber dan penggunaan dana kampanye; memfasilitasi pengawasan dan pemantauan oleh badan pengawas pemilu atau pihak ketiga.¹³

Partai Politik wajib mengungkapkan sumbangan kampanye mereka sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Pelaporan ini juga menunjukkan tingkat kepatuhan partai

¹³ Lesi Hertati and Asmawati Asharie, "Workshop Pentingnya Pelaporan Dana Kampanye Bagi Partai Politik Oleh Kantor Jasa Akuntan Di Sumatera Selatan," *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 4 (2023): 2412–19, <http://112.78.38.8/index.php/jpmb/article/view/19618>.

politik terhadap pemeriksaan yang dilakukan pada Kantor Akuntan Publik. Pelaporan dana kampanye dapat menyediakan informasi penting bagi para pemilih. Jika pemilih mengetahui susunan peserta, maka mereka bisa melihat siapa di balik kandidat tersebut dan bisa menentukan arah politik kandidat yang berkuasa¹⁴ Saat melakukan audit dana kampanye, Kantor Akuntan Publik Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan mengalami serangkaian kendala terkait pemahaman anggota dari beberapa partai calon dalam menyusun Laporan Dana Kampanye. Terkadang dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan prosedur atau tidak lengkap, maka dari itu tim auditor perlu melakukan pengecekan dengan pasangan calon untuk meminta pelengkapan dan koreksi terhadap kesalahan angka atau informasi yang tidak sesuai. Sehingga dapat menghambat pengerjaan beberapa hari, tergantung pada kecepatan tim pasangan calon dalam melakukan perbaikan Laporan Dana Kampanye.

KESIMPULAN

KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan melakukan prosedur audit dana kampanye partai politik secara cermat dan sesuai dengan standar audit yang berlaku. Audit dana kampanye merupakan proses yang sensitif karena melibatkan penggunaan dana publik dan kepatuhan terhadap peraturan yang mengatur penggunaan dana tersebut. Oleh karena itu, penting bagi KAP untuk mengikuti prosedur audit yang komprehensif dan akurat. Selama proses audit, KAP harus memastikan bahwa mereka mematuhi standar etika profesional dan prinsip audit yang valid. Hal ini termasuk menjaga independensi, objektivitas dan integritas dalam pelaksanaan penugasan audit. Selain itu, komunikasi dengan pihak terkait harus dipastikan terbuka dan transparan. Secara umum KAP Bambang Sutjipto Ngumar & Rekan pelaksanaan prosedur audit dana kampanye partai memerlukan pendekatan yang cermat dan hati-hati. Dengan memastikan kepatuhan terhadap standar audit yang berlaku dan mengelola proses audit secara jujur dan profesional, KAP dapat menjamin keakuratan dan keandalan hasil audit.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, M Prakoso, and Jerry Indrawan. "Hambatan Dan Tantangan Partai Politik :
Persiapan Menuju Pemilihan Umum 2024." *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama* 8,
no. 2 (2020): 214–29. <http://ejournal.kopertais4.or.id>.

¹⁴ NUR HIDAYAT SARDINI, "Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas," *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

- Darma Wijaya, Roy Irawan. "Prosedur Administrasi Penjuala Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat." *Skripsi Pengertian Penjualan XVI*, no. 1 (2018): 30.
- Hertati, Lesi, and Asmawati Asharie. "Workshop Pentingnya Pelaporan Dana Kampaye Bagi Partai Politik Oleh Kantor Jasa Akuntan Di Sumatera Selatan." *SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan* 7, no. 4 (2023): 2412–19. <http://112.78.38.8/index.php/jpmb/article/view/19618>.
- I Gede Wijaya Kusuma, Ida Ayu Putu Widiati, Luh Putu Suryani. "Fungsi Partai Politik Dalam Pendidikan Politik Masyarakat." *JOSH: Journal of Sharia* 1, no. 01 (2020): 62–68. <https://doi.org/10.55352/josh.v3i01.805>.
- Juanda, Ogiandhafiz. "ANALISIS PERILAKU REDUKSI KUALITAS AUDIT KAP X DALAM MELAKSANAKAN AUDIT BERDASARKAN PROSEDUR YANG DISEPAKATI (STUDI KASUS PADA AUDIT DANA KAMPANYE PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 PARTAI X)." *Encyclopedia of Corporate Social Responsibility*, 2023, 76–76. https://doi.org/10.1007/978-3-642-28036-8_100043.
- Juanda, Ogiandhafiz, and Juanda. "Peran Dan Fungsi Partai Politik Dalam Mewujudkan Pemilu Yang Berkualitas Dan Bermartabat Tahun 2024." *Jurnal Ilmu Multidisplin* 2, no. 2 (2023): 140–47. <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.
- Maulana, Daffa Athaillah, and Andafi Feyla Qintara. "Inkompatibilitas Regulasi Dana Kampanye Pada Sistem Proporsional Terbuka Dalam Pemilihan Umum Legislatif Indonesia." *Majalah Hukum Nasional* 53, no. 1 (2023): 73–88. <https://mhn.bphn.go.id>.
- Mawarni, Rima, Elisa Ayu Putri, and Dewi Triyanti. "AUDIT SISTEM INFORMASI E-LEARNING MENGGUNAKAN FRAMEWORK COBIT 5.0 (STUDY KASUS: E-LEARNING SLBN Sukamaju Kotabumi-Lampung Utara)." *Jisn* 03, no. 01 (2022): 18–25.
- Nasution, Hafifah, and Lysa Nur Awalianti. "Analisis Perencanaan Audit Laporan Keuangan Pada Kantor Akuntan Publik KURNIAWAN, KUSMADI, DAN MATHEUS." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 8, no. 3 (2020): 237–44. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v8i3.333>.
- Ramadhan, R, S Shoalihin, and M I Mansyuri. "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Audit Dana Kampanye Partai Politik." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 26930–43.

<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10970%0Ahttps://jptam.org/index.php/jptam/article/download/10970/8713>.

SARDINI, NUR HIDAYAT. “Sistem Pelaporan Dana Kampanye Berbasis Prinsip Transparansi Dan Akuntabilitas.” *Journal of Chemical Information and Modeling* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Veraniansyah, Retha Dwi Putri, and Erlangga Andi Sukma. “Prosedur Pengelolaan Arsip Untuk Keamanan Dokumen Di Rsia Puri Bunda Malang.” *Adbis: Jurnal Administrasi Dan Bisnis* 13, no. 1 (2019): 65. <https://doi.org/10.33795/j-adbis.v13i1.66>.